Tingkat Kemiskinan DIY Turun Signifikan

BANTUL (KR) - Tingkat kemiskinan di DIY pada Maret 2023 tercatat 11,04 persen atau sebanyak 448,47 ribu orang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase angka kemiskinan tersebut turun signifikan dari September 2022 sebesar 0,45 persen dan turun 0,30 persen dibandingkan Maret 2022.

Ambang batas garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat Rp 573.022/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan Rp 414.480 atau 72,33 persen dan garis kemiskinan bukan makanan Rp 158.542,00 atau 27,67 persen.

"Secara rata-rata rumah tangga miskin di DIY memiliki 4,32 orang anggota rumah tangga pada Maret 2023. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka garis kemiskinan rumah tangga mencapai Rp 2.475.455,00/rumah tangga/bulan," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Herum Fajarwati di kantornya, Senin (17/7).

Herum mengatakan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 448,47 ribu orang, turun 15,2 ribu orang terhadap September 2022. Apabila dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 turun 6,3 ribu orang.

"Setelah kami hitung, persentase kemiskinan DIY turun 0,45 persen pada Maret 2023. Ini merupakan capaian yang menggembirakan bagi DIY. Untuk turun 0,1 persen saja butuh effort yang besar apalagi bisa turun sampai 0,45 persen," tandasnya.

Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 10,27 persen, turun 0,37 persen dibandingkan September 2022. Penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 13,36 persen atau turun 0,64 persen dibandingkan September 2022.

"Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebanyak 312,83 ribu orang, turun 8,2 ribu orang dibandingkan September 2022. Sementara jumlah penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebanyak 135,63 ribu orang atau turun 6,9 ribu orang dibandingkan September 2022," terang Herum.

Sedangkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY pada Maret 2023 yang diukur dengan menggunakan indikator rasio gini sebesar 0,449, turun 0,010 jika dibandingkan rasio gini September 2022 yang mencapai 0,459. Namun jika dibandingkan rasio gini Maret 2022 yang besarnya 0,439, terlihat adanya peningkatan 0,010.

"Rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat 0,453 atau turun dibanding September 2022 sebesar 0,468. Jika dibandingkan rasio gini Maret 2022 sebesar 0,446, terlihat masih ada peningkatan 0,007 dan perdesaan tercatat 0,362. Kondisi ini menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan rasio gini September 2022 yang besarnya 0,342 dan rasio gini Maret 2022 yang sebesar 0,332," jelas Herum.

Herum menyebut, dari 27 provinsi yang secara nasional mengalami penurunan persentase angka kemiskinan Maret 2023, salah satunya DIY yang berada pada urutan 14 dari yang tertinggi Papua hingga terkecil Bali. Bahkan, angka capaian persentase kemiskinan DIY ini justru lebih baik dibandingkan capaian ketika sebelum pandemi Covid-19.

Beberapa hal yang mendorong penurunan persentase kemiskinan DIY antara September 2023 ke Maret 2023, di antaranya perekonomian DIY Triwulan I-2023 tumbuh 5,31 persen. Hal ini menggambarkan geliat ekonomi DIY cukup pesat perkembangan ke arah lebih baik. Disusul turunnya tingkat pengangguran terbuka, nilai tukar petani naik signifikan serta adanya panen raya tanaman pangan di DIY pada Maret 2023. **(Ira)-d**

SINAU SEJARAH

Pentingnya Menjaga Keistimewaan DIY

YOGYA (KR) - Paniradya Kaistimewan DIY gencar menginformasikan keistimewaan DIY melalui berbagai media. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan asal-usulnya, sehingga semua rangkaian sejarah Yogyakarta menjadi pondasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho SP MSi.

Seperti diketahui, lanjut Aris, jika dirunut ternyata ditemukan banyak peran dan nilai penting Yogyakarta dalam sejarah perjalanan bangsa yang semakin memperkuat keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu, nilai-nilai yang tertuang di dalam sejarah dapat menjadi pondasi guna memantapkan langkah-langkah ke depan dalam hal memperkuat Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Hal ini harus selalu disampaikan kepada generasi muda, terkait peran Yogyakarta yang begitu kuat dalam mempertahankan Kedaulatan Republik Indonesia, agar semangat cinta Tanah Air dan kebanggan terhadap Yogyakarta tertanam dalam benak generasi muda," katanya.

Berbagai macam program kegiatan yang dilakukan Paniradya Kaistimewan berkolaborasi dengan OPD terkait dan juga beberapa komunitas, menurut Aris, dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat DIY mengenai pentingnya menjaga Keistimewaan Yogyakarta.

KR-Wawan Isnawan

Aris Eko Nugroho SP MSi

Dikatakan, Paniradya Kaistimewan sendiri sudah mensosialisasikan berbagai macam video dokumenter dari sejarah-sejarah Keistimewaan Yogyakarta di YouTube Channel Paniradya. "Kami juga membuat berbagai macam buku sejarah, dan setiap memperingati hari-hari bersejarah membuat semacam Podcast Dialog Keistimewaan," lanjut Aris.

Untuk saat ini, menurut Aris, di lingkungan Pemda DIY juga telah melakukan beberapa program kegiatan yang salah satu tujuannya yakni guna melestarikan sejarah yang ada.

Dikatakan, Paniradya Kaistimewan merupakan lembaga yang mempunyai ketugasan, salah satunya adalah berkaitan dengan mewujudkan atau tersusunnya urusan Keistimewaan Yogyakarta. "Tentu dalam hal ini kami (Paniradya Kaistimewan) tidak bisa melakukan itu sendiri dan perlu bermitra dengan OPD yang membidangi. Diharapkan sejarah keistimewaan diajarkan menjadi bagian dari sejarah Indonesia, dan guru sejarah menyampaikan sejarah keistimewaan DIY," katanya.

Yang perlu disepakati adalah materi pokok yang harus disampaikan Guru Sejarah Indonesia. "Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bersama Dewan Pendidikan sudah membuat buku, yang selanjutnya bisa diperbanyak dan disampaikan ke sekolah-sekolah," katanya pula.

Masih dalam rangkaian untuk menginformasikan mengenai keistimewaan DIY di kalangan generasi milenial, khususnya pelajar melalui sekolah, Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) menggelar 'Sinau Sejarah Keistimewaan DIY' di Aula SMA Negeri 1 Seyegan, Sleman, Selasa (18/7) mulai pukul 10.00.

Selain Dialog Keistimewaan bertema Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, acara tersebut akan dimeriahkan dengan pentas musik dan tari. Kegiatan yang didanai dengan dana keistimewaan (danais) disiarkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY. **(Wan)**

TAK MAU MAKAN DAN MINUM OBAT

Lukas Enembe Dirawat di RSPAD

JAKARTA (KR) - Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe saat ini dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) karena menolak makan dan minum obat. Kondisi kesehatan Lukas Enembe pun akhirnya menurun.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, informasi yang diterimanya kondisi kesehatan Lukas Enembe menurun. "Ini karena yang bersangkutan tidak mau makan dan minum obat dari dokter," jelas Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (17/7).

Menurutnya, tim dokter KPK telah merekomendasikan agar Lukas Enembe untuk berobat ke RSPAD sejak Sabtu (15/7), tapi yang bersangkutan menolak untuk dirujuk. Meski demikian Lukas akhirnya bersedia untuk dirujuk ke RSPAD untuk berobat pada Minggu (16/7).

Dokter KPK, menurut Ali, sejak Sabtu sudah merekomendasikan agar dirujuk ke RSPAD. "Karena yang bersangkutan menolak sehingga tim jaksa kemudian menghubungi pihak penasihat hukum dan keluarganya agar dapat membujuk supaya mau dibawa ke RSPAD," paparnya.

Sehubungan hal itu, lanjut Ali, KPK berharap Lukas Enembe dapat bersikap kooperatif dengan mengikuti saran dari tim dokter demi kesehatannya. Selain itu, demi kelancaran proses hukum yang sedang berjalan.

Seperti diketahui, Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023 Lukas Enembe didakwa menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah rekanan. Dakwaan kedua, Lukas Enembe juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua pada 12 April 2013.

Terkait perkara ini, Rijatono Lakka telah divonis lima tahun penjara oleh PN Tipikor Jakarta. Terkini, KPK kembali menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terhadap kasus tersebut, KPK telah menyita sejumlah aset terkait perkara Lukas Enembe dalam berbagai bentuk dengan nilai total lebih dari Rp 200 miliar. **(Ful)-d**

KORUPSI DI PTPN XI

KPK Sita Dokumen Jual Beli Lahan

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen jual beli lahan dan barang bukti lainnya. Penyitaan dilakukan saat penyidik menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan hak guna usaha untuk perkebunan tebu di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, penggeledahan dilakukan Jumat (14/7). Sedang tempat yang digeledah antara lain di Kantor PTPN XI di Surabaya, perusahaan gula Assembagoes di Situbondo, beberapa kantor pihak swasta, dan rumah kediaman pihak terkait lainnya di Kota Surabaya dan Malang.

"Nah, dari lokasi tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen transaksi jual beli lahan, alat elektronik yang memiliki sangkut paut dengan perkara," kata Ali Fikri di Jakarta, Senin (17/7).

Selanjutnya, jelas Ali, barang bukti tersebut disita penyidik dan dianalisis untuk disertakan guna melengkapi berkas perkara. Penyidik KPK juga telah menetapkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi tersebut. Meski demikian, KPK belum dapat mengumumkan berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka maupun perannya dalam kasus tersebut.

Terkait hal ini, sebelumnya PTPN Persero sebagai induk PTPN Group menyatakan akan mendukung segala upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. "Sebagai induk usaha di klaster perkebunan dan kehutanan, holding Perkebunan Nusantara mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh penegak hukum," kata Direktur Hubungan Kelembagaan Holding PTPN III M Arifin Firdaus.

Penggeledahan yang dilakukan KPK, menurutnya, merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati, guna mencari kebenaran atas dugaan kasus yang terjadi. PTPN Group telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu internalisasi core value AKHLAK, Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Keterbukaan Informasi Publik, Whistle Blowing System (WBS) Terintegrasi, serta kerja sama antar-instansi termasuk KPK.

"Jadi, perusahaan memiliki komitmen jika terjadi pelanggaran dalam bidang hukum oleh pimpinan atau pihak mana pun. Maka, PTPN akan menindak tegas dengan menjalankan punishment secara ketat dan konsisten sesuai aturan yang berlaku," tandas Arifin. **(Ful)-d**

LAKUKAN PERTEMUAN DENGAN GANJAR PRANOWO

Airlangga Tampik Bicara Soal Politik

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Senin (17/7). Namun keduanya menampik pertemuan tersebut membahas persoalan politik, termasuk soal cawapres.

Menurut Airlangga, pertemuannya dengan capres yang diusung PDIP tersebut membicarakan soal Proyek Strategis Nasional (PSN) dan persoalan lainnya. "Kalau rapat pasti bahas PSN, tapi kalau lagi makan pasti segala macam bisa dibahas. Persoalannya kan tadi kita makan pecel, makan buntut, makan tahu, tahu sumedang," ujarnya di Lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta.

Dijelaskan, khusus di Jateng terdapat 37 PSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. "Pertemuan dengan Pak Ganjar tadi membahas proyek strategis nasional di Jawa Tengah. Kenapa ini penting? Karena Pak Ganjar pada 5 September sudah tidak menjadi gubernur. Jadi kita ingin mempercepat seluruh *pending issues* dengan PSN yang ada di Jawa Tengah," ungkap Airlangga.

Menurut Airlangga, rapat sejenis akan dilakukan dengan Gubernur Jawa Barat dan Jawa Timur. "Ya tentu saya dengan Pak Ganjar kan kenal sejak kuliah, sama-sama dari Gadjah Mada, jadi semua pembicaraan pasti terbahas dan kalau setiap kali saya ada acara tahunan di Jawa Tengah pasti ada Pak Ganjar," ungkapnya.

Namun, Airlangga mengaku belum memutuskan akan lebih mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP atau Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra. "Tapi Golkar solid dan komunikasi dengan partai baik semua. Kalau bicara Golkar, kita masih melakukan pembicaraan dengan partai-partai dan pembicaraan masih cukup intens," pungkasnya.

Sementara Ganjar Pranowo mengatakan, komunikasi politiknya dengan Airlangga Hartarto belum sampai pada tahap pembahasan calon wakil presiden (cawapres). "Belum, belum sampai tahap itu (bahas cawapres)," ujarnya usai memberi pidato di pelatihan juru kampanye (jurkam) tim pemenangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di iNews Tower Jakarta Pusat, Senin (17/7).

Ganjar juga mengatakan bahwa dirinya dengan Airlangga sama-sama alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Mereka juga tergabung ke Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama). Oleh sebab itu, sering bertemu dan berkomunikasi dengan Airlangga. Bahkan, dia tak menampik sempat berdiskusi soal kemungkinan-kemungkinan politik ke depan. "Kami bicara agenda-agenda ke depan, meskipun tentu dalam kepentingan praktis pastilah negosiasi-negosiasi akan dilakukan," tuturnya. **(Ant/Has)-d**

KR-Antara/Hendra Nurdiyansyah

***DAMPAK PENUTUPAN TPST PIYUNGAN:** Warga melintas di dekat Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di Yogyakarta, Senin (17/7/2023). Penutupan sementara Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan untuk penataan berimbas pada tutupnya sejumlah TPSS di Kota Yogyakarta.*

BOCORNYA 337 JUTA DATA KEPENDUDUKAN

Kemenkominfo-BSSN Segera Lakukan Audit

JAKARTA (KR) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengatakan, pihaknya akan memeriksa dugaan bocornya 337 juta data kependudukan. Kemenkominfo akan memanggil pengendali data tersebut, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Jumlah penduduk kita kan 275 juta, itu ada 300 juta, berarti kelebihan, karena itu kita akan periksa seperti apa," ujar Usman Kansong di Jakarta, Senin (17/7).

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemenkominfo akan terlebih dulu mendengar laporan dari kedua lembaga tersebut. Jika nanti ditemukan adanya kebocoran data, BSSN akan melakukan audit untuk mencari tahu jumlah dan data apa saja yang bocor, kemudian hasil audit tersebut dilaporkan ke Kemenkominfo.

"Kita akan lihat kalau ada pengendalian data yang tidak baik, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sanksi apa yang bisa kita jatuhkan kepada pengendali data," katanya.

Sebelumnya, kasus dugaan kebocoran data itu diungkap pertama kali oleh akun Twitter bernama pengguna @DailyDarkWeb Sabtu (15/7). Dalam salah satu unggahannya, akun itu menyebutkan sebanyak 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum para peretas (hacker).

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menyatakan, berdasarkan audit investigasi yang dilakukan, pihaknya dan BSSN tidak ditemukan jejak kebocoran data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat Online.

"Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama BSSN dan stakeholders telah melaksanakan mitigasi preventif dan audit investigasi secara cepat dengan hasil sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran data pada SIAK Terpusat Online yang dijalankan Ditjen Dukcapil Kemendagri," bantah Teguh, kemarin.

Meskipun begitu, lanjutnya, audit investigasi masih terus dilakukan Ditjen Dukcapil bersama BSSN beserta pemangku kepentingan terkait guna mendalami dugaan kebocoran data kependudukan tersebut. Teguh menyebutkan, saat ini audit investigasi terhadap dugaan kebocoran data mulai diarahkan ke pangkalan data kependudukan yang dikelola pemerintah kabupaten/kota. **(Ant/Obi)-d**